

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA BAGI
PEMBANGUNAN EKONOMI DAN INFRASTRUKTUR DI
DESA BARANGMAMASE KECAMATAN GALESONG
SELATAN KABUPATEN TAKALAR**

SKRIPSI



**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2024

KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA

JUDUL PENELITIAN:

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA BAGI
PEMBANGUNAN EKONOMI DAN INFRASTRUKTUR DI
DESA BARANGMAMASE KECAMATAN GALESONG
SELATAN KABUPATEN TAKALAR**

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Oleh:

MUHAMMAD ADNAN JAKARIA

NIM:105711101820

*Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi
Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar*

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2024

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Sesungguhnya berserta kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (untuk urusan yang lain) dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap (Q.S. Al Insyirah: 6-8)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas Ridho-Nya serta karunianya sehingga skripsi ini telah terselesaikan dengan baik.

Alhamdulillah Rabbil'alamin

Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku tercinta

Orang-orang yang saya sayang dan almamaterku



**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar



HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Implementasi Kebijakan Dana Desa Bagi Pembangunan
Ekonomi dan Infrastruktur Di Desa Barangmamase
Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar

Nama Mahasiswa : Muhammad Adnan Jakaria

No. Stambuk/Nim : 105711101820

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan didepan panitia
Penguji skripsi Strata Satu (S1) pada tanggal 27 Agustus 2024 di Program Studi
Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Makassar

Makassar, 3 September 2024

Menyetujui

Pembimbing I

Dr. Asriati, SE., M.Si
NIDN.0031126303

Pembimbing II

Warda, SE., M.E
NIDN.0927039003

Mengetahui



Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
NBM : 651 507

Ketua Program Studi

Asdar, SE., M.Si
NBM: 128 6845



**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama: MUHAMMAD ADNAN JAKARIA, Nim: 105711101820, diterima dan disahkan oleh panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0003/SK-Y/60201/091004/2024 M, Tanggal 22 Safar 1446 H / 27 Agustus 2024 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 22 Safar 1446 H
27 Agustus 2024

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, MT., IPU (.....)
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si.)
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, S.E., M.Acc.)
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Prof. Dr. Akhmad, SE., M.Si (.....)
2. Dr. Asriati, SE., M.Si (.....)
3. Dr. Hj. Arniati, SE., M.Pd (.....)
4. A. Nur Fitrianti, SE., M.Si (.....)

**Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar**

Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si.
NBM : 651 507



PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar



SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Nama Mahasiswa : Muhammad Adnan Jakaria
No. Stambuk/ NIM : 105711101820
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Dana Desa Bagi Pembangunan
Ekonomi Dan Infrastruktur Di Desa Barangmamase
Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 03 September 2024

Yang Membuat Pernyataan,

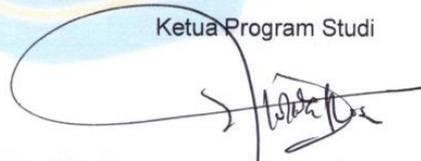


Muhammad Adnan Jakaria
NIM : 105711101820

Diketahui Oleh:



Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NIDN:0903039102



Ketua Program Studi

Asdar, S.E., M.S.i
NIDN: 1151132

**HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Adnan Jakaria
Nim : 105711101820
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Implementasi Kebijakan Dana Desa Bagi Pembangunan Ekonomi Dan Infrastruktur Di Desa Barangmase Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Makassar, 03 September 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Muhammad Adnan Jakaria
Nim: 105711101820

ABSTRAK

MUHAMMAD ADNAN JAKARIA. Tahun 2024. Implementasi Kebijakan Dana Desa Bagi Pembangunan Ekonomi Dan Infrastruktur Di Desa Barangmamase Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar. Skripsi. Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing Oleh : Asriati dan Warda.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Dana Desa Bagi Pembangunan Ekonomi Dan Infrastruktur di Desa Barangmamase Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang diolah merupakan hasil wawancara yang dilakukan pada 9 orang informan yakni Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kaur Perencanaan, Kepala Dusun Serta Masyarakat. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang di dapat adalah bahwa Implementasi Kebijakan Dana Desa Bagi Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur di Desa Barangmamase Kecamatan Galesong Selatan di Kabupaten Takalar sudah cukup berjalan baik, dimana dalam pelaksanaan program tersebut semua dilaksanakan dan terselesaikan dengan tepat waktu dan tepat sasaran. Kemudian program tersebut telah atau sudah pernah disosialisasikan terlebih dahulu dalam musyawarah desa sebelum melaksanakan program pembangunan, Kemudian untuk perencanaan program dan pelaksanaannya dilapangan sudah bertahap dan sesuai dengan ketentuannya.

Kata Kunci : Kebijakan, Dana Desa, Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur

ABSTRACT

MUHAMMAD ADNAN JAKARIA. Year 2024. Implementation of Village Fund Policy for Economic Development and Infrastructure in Takalar District. Thesis. Department of Development Economics, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Guided by: Asriati and Warda.

The purpose of this study is to determine the Implementation of Village Fund Policy for Economic and Infrastructure Development in Barangmamase Village, South Galesong District, Takalar Regency. This type of research is descriptive research with a qualitative approach. The data processed was the result of interviews conducted on 9 informants, namely the Village Head, Village Secretary, Village Treasurer, Planning Head, Hamlet Head and the Community. The data collection methods used in this study were observation, interviews and documentation. The results of the research obtained are that the implementation of the Village Fund Policy for Economic and Infrastructure Development in Barangmamase Village, South Galesong District in Takalar Regency has gone quite well, where in the implementation of the program everything was implemented and completed on time and on target. Then the program has been or has been socialized first in village meetings before implementing the development program. Then the program planning and implementation in the field have been carried out in stages and in accordance with the provisions.

Keywords : Policy, Village Fund, Economic Development and Infrastructure



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Dana Desa Bagi Pembangunan Ekonomi Dan Infrastruktur Di Desa Barangmase Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar”**.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Syaharuddin dan ibu Almh. Salassari yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tanpa pamrih. Dan seluruh keluargaku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat serta doa restu atas keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu hingga akhir studi ini. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, MT., IPU Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Bapak Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Asdar, SE., M. Si., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Dr. Hj. Asriati, SE., M.Si selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehinggaskripsi selesai dengan baik.
5. Ibu Warda, SE., M.E., selaku pembimbing II yang telah berkenan membantu selama penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunyakepada penulis selama kuliah.
7. Bapak Dr. H. Muhammad Iqram Idrus, M.Si Selaku Penasehat Akademik (PA) penulis.
8. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
9. Terima kasih kepada Kepala Desa Barangmase beserta Stafnya yang telah mengizinkan dan membantu penulis selama melakukan penelitian.
10. Terima kasih kepada Riska Yang Telah Memberikan Semangat dan waktunya dan teman-teman terkhusus teman kelas EP 20 A yang telah menemani saya selama kuliah serta rekan rekan dari Fakultas Ekonomi Dan Bisnis.

11. Terima kasih kepada Keluarga yang selalu memberikan semangat dan waktunya selama penyusunan skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Makassar, 21 Safar 1446 H

26 Agustus 2024 M

Penulis,

Muhammad Adnan Jakaria

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI AKHIR	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Pustaka	6
1. Implementasi	6
2. Desa.....	7
3. Dana Desa.....	12
4. Pembangunan Ekonomi.....	19

5. Infrastruktur	21
B. Tinjauan Empiris	23
C. Kerangka Pikir	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Fokus Penelitian	28
C. Situs Dan Waktu Penelitian	29
D. Jenis Dan Sumber Data.....	29
E. Informan	30
F. Teknik Pengumpulan Data.....	31
G. Metode Analisis Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	34
B. Hasil Penelitian	38
C. Pembahasan	43
BAB V PENUTUP	46
A. Kesimpulan.....	46
B. Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA.....	47
LAMPIRAN.....	49

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	23
Tabel 3.1 Tabel Informan.....	31
Tabel 4.1 Batas Wilayah Desa Barangmamase	34
Tabel 4.2 Banyak Penduduk Desa Barangmamase Tahun 2020-2023.....	36
Tabel 4.3 Sarana Pendidikan Desa Barangmamase	37
Tabel 4.4 Program Pembangunan Ekonomi Dan Infrastruktur Desa	39



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Konsep	27
Gambar 4.1 Peta Desa Barangmamase	35



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara Dan Hasil Wawancara	50
Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian.....	57
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian	63
Lampiran 4 Surat Izin Meneliti.....	63
Lampiran 5 Surat Balasan Telah Melakukan Penelitian.....	64
Biografi Penulis.....	65



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan juga merupakan negara ke 4 terbesar dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, sehingga Indonesia sering dihadapkan dengan berbagai masalah sosial antara lain seperti, kemiskinan dan kurangnya infrastruktur. Masalah kurangnya infrastruktur dan kemiskinan di Indonesia paling relative banyak terdapat di pedesaan, khususnya daerah terpencil dan tertinggal yang paling merasakan permasalahan ini.

Kebijakan dana desa telah diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Permendes 21 Tahun 2015 tentang prioritas penggunaan dana desa serta PP 60 Tahun 2014 tentang dana desa bersumber dari APBN. Sumber dana desa berasal dari relokasi dana pusat berbasis desa dan alokasi dana desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/kota setelah dikurangi DAK. Kemudian implementasi alokasi dana desa berasal dari pemerintah pusat melalui transfer kedaerah dari DAU dan DBH yang besarnya disesuaikan dengan jumlah penduduk setiap desa, jumlah kemiskinan, IKK, dan luas wilayah desa.

Desa merupakan unit paling bawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Peran fungsi dan kontribusinya menempati posisi yang strategis dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan akan sangat bergantung pada kesiapan desa dalam menata sistem pemerintahannya agar tercipta pembangunan yang efektif, efisien, transparansi dan akuntabel serta

mendapat partisipasi dari masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan.

Salah satu indikator pembangunan desa dapat dilakukan dengan pemanfaatan dana desa. Dana desa berfungsi untuk pelaksanaan pembangunan desa seperti pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat desa serta pembangunan ekonomi masyarakat desa. Dana desa diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional. Alokasi dana desa diambil dari 10 % dari dana APBD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa maka pembangunan desa dapat dilakukan dengan dana desa.

Karena mengingat pentingnya pembangunan desa maka perlu dilakukan perubahan dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi, sehingga kesempatan terbuka bagi desa untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa membuat kedudukan desa menjadi lebih kuat.

Banyak pihak yang khawatir dana desa tersebut disalah gunakan, bukannya dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa malah akan menjadi lahan aparaturnya untuk melakukan tindak pidana korupsi. Untuk mencegah hal ini terjadi aparaturnya desa perlu diberikan pelatihan dan tentunya pengawasan agar lebih mempersempit ruang penyalahgunaan dana desa tersebut.

Agar dana desa tepat sasaran dan tidak disalah gunakan maka menteri desa dan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi mengeluarkan

Permendes Nomor 21 Tahun 2016 tentang penempatan prioritas pembangunan dana desa tahun 2016. Peraturan tersebut berisi tentang dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas belajar desa disepakati dalam musyawarah desa dan hasil musyawarah tersebut menjadi acuan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes).

Dana desa yang digunakan untuk pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup serta penanggulangan kemiskinan dan yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk meningkatkan kapasitas warga dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan wilayah ekonomi individu warga kelompok masyarakat.

Salah satu cara untuk memperkuat perekonomian dipedesaan adalah dengan memperbaiki infrastruktur pedesaan tersebut yang bertujuan untuk memperbesar potensi yang ada dan menjadikan desa sebagai tulang punggung ekonomi regional dan nasional. Pembangunan desa bersifat multi aspek. Karna itu perlu dilakukan analisis secara lebih terarah serta keterkaitan dengan bidang sektor dan aspek diluar pedesaan (fisik dan non fisik, ekonomi dan non ekonomi, sosbud, dan non spasial).

Desa Barangmamase merupakan salah satu desa yang terletak di Perbatasan Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar Dengan Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa. Saat ini Desa Barangmamase di pimpin oleh Bapak Usman, SE Dg. Ngunjung yang sudah 3 periode menjabat sebagai kepala desa barangmamase.

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan di atas penulis tertarik untuk mendeskripsikan sejauh mana penggunaan dana desa dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur bagi masyarakat. Mengingat setiap desa memperoleh milyaran rupiah pertahun dari anggaran dana desa dan diharapkan dengan adanya dana desa tersebut dapat membawa dampak positif bagi pembangunan ekonomi dan infrastruktur desa. Dan Desa Barangmamase merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Galesong Selatan kabupaten Takalar yang dipilih penulis sebagai lokasi tempat penelitian. Maka penulis mengangkat hal ini dalam bentuk Proposal yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Dana Desa Bagi Pembangunan Ekonomi Dan Infrastruktur Di Desa Barangmamase Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di paparkan sebelumnya maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : “Bagaimana Implementasi Kebijakan Dana Desa Bagi Pembangunan Ekonomi Dan Infrastruktur Di Desa Barangmamase Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar”?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Dana Desa Bagi Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur Di Desa Barangmamase Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar.

D. Manfaat Penelitian

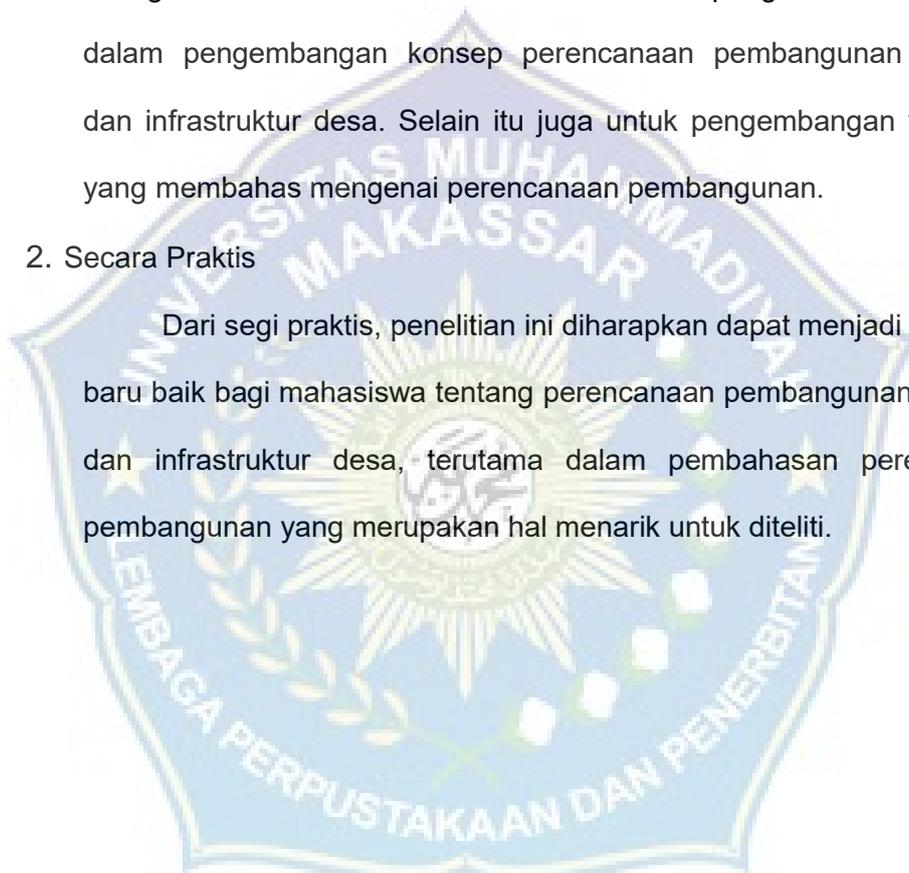
Adapun manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, dapat dilihat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan konsep perencanaan pembangunan ekonomi dan infrastruktur desa. Selain itu juga untuk pengembangan teori-teori yang membahas mengenai perencanaan pembangunan.

2. Secara Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan baru baik bagi mahasiswa tentang perencanaan pembangunan ekonomi dan infrastruktur desa, terutama dalam pembahasan perencanaan pembangunan yang merupakan hal menarik untuk diteliti.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Implementasi

Implementasi merupakan tahap realisasi tujuan-tujuan program. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah persiapan implementasi, yaitu memikirkan dan memperhitungkan secara matang berbagai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan termasuk hambatan atau peluang-peluang yang ada dan kemampuan organisasi yang disertai tugas melaksanakan program (Mulyadi, 2015:25). Menurut Pressman dan Wildavsky implementasi dimaknai dengan beberapa kata kunci sebagai berikut: untuk menjalankan kebijakan (to carry out), untuk memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan (to fulfill), untuk menghasilkan output sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (to produce), untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (Purwanto, 2015:20).

Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) telah membuka sebuah era baru dalam pembangunan desa di Indonesia. Dana desa yang jumlahnya cukup besar memberikan peluang percepatan pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Desa yang selama ini menjadi objek kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, kini menjadi subyek pembangunan dengan kewenangan dan kesempatan yang lebih luas dalam merumuskan kebijakan dan melaksanakan pembangunannya sendiri.

Implementasi kebijakan publik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan dana desa yang tertuang dalam UU Desa. Kebijakan Di tingkat kabupaten, Banjarnegara berkaitan dengan adanya sebagai tindak lanjut UU Desa dan PP No.60 Tentang Dana Desa diterbitkan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa, di mana di dalamnya dijelaskan mengenai dana desa yaitu:

"Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat"

Sebagai implementor kebijakan adalah pemerintah desa dengan sasaran kebijakannya adalah masyarakat desa dan dengan tujuan jangka pendek yang akan diteliti yaitu peningkatan infrastruktur pedesaan serta peningkatan pendapatan masyarakat desa.

2. Desa

a. Pengertian Desa

Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administrative di Indonesia di bawah kecamatan yang dipimpin oleh Kepala desa. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, desa adalah suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat yang didalamnya merupakan kesatuan hukum yang memiliki orientasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri (otomatis) dalam ikatan kesatuan Republik Indonesia. Lalu dijelaskan Kembali pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 desa atau yang disebut dengan nama lain,

selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten. Kawasan desa adalah Kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam, dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Menurut Bintarto desa adalah sebuah perwujudan geografis (wilayah) yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi sosial ekonomi, politik, dan kultural dalam hubungan dan pengaruh timbal baliknya dengan daerah-dearah sekitarnya.

b. Unsur-Unsur Desa

Unsur-Unsur desa adalah :

1. Daerah, dalam arti tanah-tanah yang produktif dan yang tidak beserta penggunaannya, termasuk juga unsur lokasi, luas dan batas yang merupakan lingkungan geografi setempat.
2. Penduduk, adalah hal yang meliputi jumlah, pertambahan, kepadatan, persebaran dan mata pencaharian penduduk desa setempat.
3. Tata kehidupan, dalam hal ini pola tata pergaulan dan ikatan-ikatan pergaulan warga desa. Jadi, menyangkut seluk-beluk masyarakat desa. Ketiga unsur desa ini tidak lepas satu sama lain, artinya tidak berdiri sendiri, melainkan suatu kesatuan hidup atau "living unit". Tata kehidupan dalam arti yang baik memberikan jaminan akan

ketentraman dan keserasian hidup Bersama desa. Maju mundurnya desa tergantung pada ketiga unsur ini yang dalam kenyataan ditentukan oleh faktor unsur manusia human efforts dan tata geografi “geographical setting”. Suatu daerah dapat berarti bagi penduduk apabila ada “human efforts” untuk memanfaatkan daerahnya. Tiap-tiap desa mempunyai “geographical setting” dan “human efforts” yang berbeda-beda, sehingga tingkat keadaan kemakmuran dan tingkat kemajuan penduduk tidak sama. Unsur lain yang termasuk unsur desa yaitu unsur letak. Letak suatu desa pada umumnya selalu jauh dari kota atau dari pusat-pusat keramaian. Peninjauan ke desa-desa atau perjalanan ke desa sama daerah-daerah yang monoton dan sunyi. Desa-desa yang letaknya pada perbatasan kota mempunyai kemungkinan untuk lebih berkembang dibandingkan dengan desa-desa di pedalaman. Unsur letak menentukan besar-kecilnya isolasi suatu daerah terhadap daerah-daerah lainnya. Desa yang terletak jauh dari perbatasan kota memiliki lahan pertanian yang luas. Ini disebabkan karena penggunaan lahan dititik beratkan pada tanaman pokok dan beberapa tanaman perdagangan dari pada untuk Gedung-gedung atau perumahan.

c. Fungsi Dan Potensi Desa

Desa mempunyai fungsi dan potensi yaitu yang Pertama, dalam hubungannya dengan kota, maka desa merupakan “hinterland” atau daerah dukung berfungsi sebagai suatu daerah pemberi bahan makan pokok seperti padi, jagung, ketela, disamping bahan makan lain seperti kacang, kedelai, buah-buahan, dan bahan makan lain yang berasal dari

hewan. Kedua, desa ditinjau dari sudut potensi ekonomi sebagai lumbung bahan mentah (raw material) dan tenaga kerja (man power) yang tidak kecil artinya. Ketiga, dari segi kegiatan kerja (occupation) desa dapat merupakan desa agraris, desa manufaktur, desa industry, desa nelayan, dan sebagainya.

Desa mempunyai potensi fisis dan potensi non fisis.

Potensi fisis meliputi antara lain:

1. Tanah, dalam arti sumber tambang dan mineral, sumber tanaman yang merupakan sumber mata pencaharian dan penghidupan.
2. Air, dalam arti sumber air, keadaan atau kualitas air dan tata airnya untuk kepentingan irigasi, pertanian dan keperluan sehari-hari.
3. Iklim, yang merupakan peranan bagi desa agraris.
4. Ternak, dalam artian fungsi ternak di desa sebagai sumber tenaga, sumber bahan makan dan sumber keuangan,
5. Manusia, dalam arti tenaga kerja sebagai pengolah tanah dan sebagai produsen.

Potensi non fisis meliputi antara lain:

1. Masyarakat desa yang hidup berdasarkan gotong royong dan dapat merupakan suatu kekuatan berproduksi dan kekuatan membangun atas dasar kerjasama dan saling pengertian.
2. Lembaga-lembaga sosial, Pendidikan dan organisasi-organisasi sosial desa yang dapat memberikan bantuan sosial serta bimbingan dalam arti positif.

3. Aparatur atau pamong desa yang kreatif dan berdisiplin sumber kelancaran dan tertibnya pemerintahan desa.

Potensi yang dimiliki setiap desa berbeda, hal ini karena lingkungan geografis dan keadaan penduduknya berbeda, luas tanah, macam tanaman dan tingkat kesuburan tanah yang tidak sama. Sumber air dan tata cara air yang berlainan menyebabkan cara penyesuaian atau corak kehidupannya berbeda. Keadaan penduduk dan dasar hidup masyarakat desa yang berbeda mengakibatkan adanya berbagai karakteristik dan berbagai tingkat kemajuan desa, yaitu :

1. Desa yang kurang berkembang atau terbelakang.
2. Desa yang sedang berkembang.
3. Desa berkembang atau desamaju.

Maju mundurnya suatu desa tergantung pada beberapa faktor antara lain:

1. Potensi desa yang mencakup potensi sumber daya alam dan potensi penduduk warga desa beserta pamongnya.
2. Interaksi antara desa dengan kota, antara desa dengan desa tercakup di dalamnya perkembangan komunikasi dan transportasi.
3. Lokasi desa terhadap daerah-daerah disekitarnya yang lebih maju.

d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) membawa perubahan pada tata kelola pemerintah desa, terutama pengelolaan keuangan desa. Semangat

lahirnya UUD Desa adalah undang memperkuat desa. Banyak nyata penguatan keuangan desa dalam UUD Desa adalah terdapat alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai salah satu sumber penerimaan desa yang disebut dana desa. pasal 1 angka 8 peraturan pemerintahan (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyebutkan dana desa adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi anggaran untuk desa ditetapkan sebesar 10% dari total dana tranfer ke daerah dan akan dipenuhi secara bertahap sesuai dengan kemampuan APBN. Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang- undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab untuk mengelola dana desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Dana Desa

a. Pengertian Dana Desa

Ada kekeliruan masyarakat dalam memahami antara dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD), sebenarnya kedua program ini

memiliki perbedaan yaitu, Dana Desa (DD) merupakan kewajiban Pemerintah Pusat untuk mengalokasikan anggaran transfer ke Desa di dalam APBN sebagai wujud pengakuan dan penghargaan Negara kepada Desa. Prioritas penggunaan DD diatur melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No 5 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan anggaran untuk Desa yang diambilkan dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan bagian Dana Perimbangan. Besaran ADD masing-masing Kabupaten/Kota setiap tahun adalah sepuluh persen (10%) (Kementrian Desa, 2016).

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2014). Penghitungan anggaran berdasarkan jumlah desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Dana desa telah menjadi krusial dalam undang-undang desa, oleh karena itu dalam penyelenggaraan pemerintah desa, dalam penyelenggaraan kegiatan desa membutuhkan pembinaan dan pengawasan (Prabawa, 2016). bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap desa di wilayahnya. Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Kabupaten/kota menghitung besaran Dana Desa untuk

setiap desa berdasarkan alokasi dasar dan alokasi formula. Besaran Alokasi dasar setiap desa dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar setiap kabupaten/kota dengan jumlah desa di kabupaten/kota yang bersangkutan. Besaran Alokasi Formula setiap desa, dihitung dengan bobot sebagai berikut :

- a. 25 % (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk;
- b. 35 % (tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan;
- c. 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah;
- d. 30 % (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

Angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan Indeks kesulitan geografis (IKG) Desa. IKG Desa ditentukan oleh faktor yang terdiri atas ketersediaan prasarana pelayanan dasar, kondisi infrastruktur dan aksesibilitas transportasi.

b. Tujuan Dana Desa

Pada dasarnya program pemerintah harus memiliki tujuan yang jelas dan memberi pengaruh yang baik kepada masyarakat. Pada hakekatnya tujuan umum dari pembangunan pedesaan adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan melalui pencapaian kemajuan sosial dan ekonomi secara berkesinambungan dengan tetap memperhatikan persamaan hak dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan bagi masyarakat secara keseluruhan. Secara singkat dapat dikemukakan bahwa tujuan pembangunan secara luas adalah peningkatan perbaikan kualitas hidup masyarakat secara multidimensional.

Tujuan dari dana desa dari kementerian keuangan RI yaitu:

- a. Meningkatkan pelayanan publik di desa
- b. Mengentaskan kemiskinan
- c. Memajukan perekonomian desa
- d. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa
- e. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan

c. Sumber Dana Desa

Melalui Undang-Undang Desa, Desa telah diperkuat kewenangannya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain diperkuat kewenangannya, Desa juga diberikan sumber-sumber pendapatan.

UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (1), Pendapatan Desa bersumber dari :

1. Pendapatan Asli Desa : Hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa
2. Dana Desa dari APBN
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kab/Kota (paling sedikit 10%)
4. Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kab/Kota (minimal 10% dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum)

5. Bantuan keuangan dari APBD Prov dan APBD Kab/Kota
6. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga
7. Lain-lain pendapatan Desa yang sah

d. Pengawasan Dana Desa

Pengawasan yang berasal dari desa dilakukan oleh BPD dan Masyarakat desa. Kecamatan akan melakukan monitoring semua desa dalam penggunaan dana desa. Inspektorat yang berasal dari Kabupaten akan melakukan audit setiap tahunnya. Begitu juga dengan BPK yang berasal dari pusat akan melakukan audit setiap tahunnya. Anggaran dana desa yang berlebih setiap tahunnya atau yang sering disebut dengan sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahunan Berjalan (SILPA) tidak dapat digunakan pada tahun berjalan.

e. Peraturan Dana Desa

Adapun Peraturan Dana Desa sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
2. Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN.
3. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari APBN.
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 1 Tahun 2015 Tentang

Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Usuk dan Kewenangan Lokasi Berskala Desa.

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Dan Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 6 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi.
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.

f. Prinsip-Prinsip Dalam Pelaksanaan Dana Desa

Dalam pelaksanaan dana desa maka harus memperhatikan prinsip-prinsip dibawah ini :

1. Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan.
2. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagai besar masyarakat desa.
3. Tipologi desa, dengan memperhatikan keadaan dan kenyataan karakteristik, geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan antara perkembangan dan kemajuan

g. Pertanggungjawaban Dana Desa

Pertanggungjawaban dana desa tidak terpisahkan dari pertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa yang menjadi tanggung jawab kepala desa sebagai pemegang kuasa pengelolaan keuangan desa. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban ditetapkan dengan peraturan desa, dan dilampiri :

1. Format laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBD desa tahun anggaran berkenaan.
2. Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan dan
3. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

h. Mekanisme dan Tahap Penyaluran Dana Desa

Penyaluran dana desa meliputi dua tahap yaitu penyaluran dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan dari RKUD ke Rekening Kas Daerah (RKD). Penyaluran dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tahap I, pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen).
2. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).

Penyaluran dana desa dari RKUN ke RKUD tahap I dilakukan setelah Direktur Jendral Perimbangan Keuangan menerima peraturan daerah mengenai APBD kabupaten/kota tahun anggaran berjalan. Tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa dan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya dari bupati/walikota. Penyaluran dana desa tahap II dilakukan setelah Menteri c.q. Direktur Jendral Perimbangan Keuangan menerima laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa tahap I dari bupati/walikota yang menunjukkan paling kurang 50%. Penyaluran dana desa tahap I dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh bupati/walikota, setelah menerima dari kepala desa berupa :

1. Peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
2. Laporan realisasi penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya.

Penyaluran dana desa tahap II dilakukan setelah bupati/walikota menerima laporan realisasi penggunaan dana desa tahap I dari kepala desa yang menunjukkan dana desa telah digunakan paling kurang sebesar 50%.

Dalam hal ini terdapat desa terpencil yang belum terjangkau dengan layanan perbankan, bupati/walikota dapat mengatur lebih lanjut mengenai penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD melalui peraturan bupati/walikota yang disampaikan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

4. Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang sering kali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil per kapital. Jadi tujuan pembangunan ekonomi disamping untuk menaikkan pendapatan nasional riil juga untuk meningkatkan produktivitas. Teori-teori pembangunan ekonomi menurut para ahli :

- a. Menurut Adam Smith, untuk berlangsungnya perkembangan ekonomi diperlukan adanya spesialisasi atau pembagian kerja agar produktivitas tenaga kerja bertambah. Spesialisasi dalam proses produksi akan dapat meningkatkan keterampilan tenaga kerja, akan mendorong ditemukannya alat-alat atau mesin-mesin baru dan akhirnya dapat mempercepat dan meningkatkan produksi.
- b. Menurut David Ricardo, di dalam masyarakat ekonomi ada tiga golongan masyarakat yaitu golongan kapitalis, golongan buruh dan golongan tuan tanah. Golongan kapitalis adalah golongan yang memimpin produksi dan memegang peranan yang penting karena mereka selalu mencari keuntungan dan menginvestasikan kembali pendapatannya dalam bentuk akumulasi capital yang mengakibatkan naiknya pendapatan nasional. Untuk golongan buruh, dikatakan bahwa golongan ini tergantung pada golongan kapitalis dan golongan yang

terbesar dalam masyarakat. Adapun golongan tuan tanah, merekahanya menerima sewa saja dari golongan kapitalis atas area tanah yang disewakan. Menurut David Ricardo apabila jumlah penduduk bertambah terus dan akumulasi capital terus-menerus terjadi, maka tanah yang subur menjadi kurang jumlahnya atau semakinlangka adanya. Akibatnya berlaku pula hukum tambahan hasil yang semakin berkurang. Disamping itu juga ada persaingan di antara kapitalis-kapitalis itu sendiri dalam mengolah tanah yang semakin kurang kesuburannya dan akibatnya keuntungan mereka semakin menurun hingga sampai pada tingkat keuntungan yang normal saja.

- c. Menurut Malthus untuk adanya perkembangan ekonomi diperlukan adanya kenaikan jumlah kapital untuk investasi yang terus menerus. Adanya perkembangan ekonomi atau kenaikan produksi diharapkan bila ada tabungan yang digunakan untuk keperluan investasi. Tetapi investasi ini dihambat oleh kurangnya permintaan efektif. Adapun kurangnya permintaan efektif disebabkan oleh penambahan jumlah penduduk yang berakibat menekan tingkat upah dan di samping itu juga karena pendapatan yang diterima ada yang ditabung dan tidak dikonsumsi semua.

5. Infrastruktur

Definisi infrastruktur dalam kamus besar bahasa Indonesia, dapat diartikan sebagai sarana dan prasarana umum. Sarana secara umum diketahui sebagai fasilitas publik seperti rumah sakit, jalan, jembatan, sanitasi, telpon, dan sebagainya. Dalam ilmu ekonomi infrastruktur merupakan wujud dari publik capital (modal publik) yang dibentuk dari

investasi yang dilakukan pemerintah. Infrastruktur dalam penelitian ini meliputi jalan, jembatan, dan sistem saluran pembuangan (Mankiw, 2013).

Menurut Mankiw (2003:38) yang dikutip dari Tunjung Hapsari (2011) menjelaskan bahwa saran secara umum diketahui sebagai fasilitas publik seperti rumah sakit, jalan, telepon, dll. Familo (2004:16) menyebut infrastruktur sebagai basic essential service dalam proses pembangunan. Selanjutnya infrastruktur dibagi menjadi dua kelompok yaitu infrastruktur berdasarkan fungsi dan peruntukannya.

Amilo (2004:20) menjelaskan bahwa infrastruktur dibedakan menjadi infrastruktur ekonomi dan sosial. Infrastruktur memegang peran penting dalam mendorong kinerja pertumbuhan ekonomi diberbagai negara. Infrastruktur ekonomi diantaranya utilitas publik seperti tenaga listrik, telekomunikasi, suplai air bersih, sanitasi, dan saluran pembuangan dan gas. Kemudian juga termasuk pula pekerja umum, seperti jalan, kanal, bendungan, irigasi dan drainase serta proyek transportasi seperti jalan kereta api, angkutan kota, waterway, dan bandara sedangkan infrastruktur sosial dapat dibedakan menjadi infrastruktur pendidikan dan kesehatan.

Menurut Canning dan Pedroni (2004:11) menyatakan bahwa infrastruktur memiliki sifat eksternalitas. Berbagai infrastruktur seperti jalan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya memiliki sifat eksternalitas positif. Memberikan dukungan bahwa fasilitas yang diberikan oleh berbagai infrastruktur merupakan eksternalitas positif yang dapat meningkatkan produktivitas semua input dalam proses produksi.

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian tentang dana desa yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah dan skripsi Ekonomi yang menjadi referensi penulis dalam menyelesaikan Proposal ini.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama (Tahun)	Judul Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ihdina Dewi (2021)	Efektivitas Dana Desa Bagi Pembangunan Ekonomi Dan Infrastruktur Desa Bonto Jai Kecamatan Bissappu Di Kabupaten Bantaeng	Deskriptif Dengan Pendekatan Kualitatif	Bahwa Program Pembangunan Ekonomi Dan Infrastruktur Desa Bonto Jai Kecamatan Bissappu Di Kabupaten Bantaeng cukup berjalan baik jika dilihat dari tiga indikator efektivitas mulai dari indikator yang pertama yaitu pencapaian tujuan, dimana dalam pelaksanaan program tersebut semua dilaksanakan dan terselesaikan dengan tepat waktu dan tepat sasaran, indikator yang kedua yaitu integrasi, dimana program tersebut telah atau sudah pernah disosialisasikan terlebih dahulu dalam musyawarah desa sebelum melaksanakan program pembangunan, kemudian indikator yang ketiga yaitu adaptasi, dimana untuk perencanaan program dan pelaksanaannya dilapangan sudah bertahap dan sesuai dengan ketentuannya.
2	Ni'ma Rahmadana (2021)	Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Desa Towara Pantai Kecamatan	Deskriptif Kualitatif	Dilihat dari aspek <i>standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan</i> dilakukan musyawarah desa hingga kemusyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) dengan melibatkan masyarakat agar kebijakan yang dibuat sesuai

		Petasai Timur Kabupaten Morowali Utara		<p>dengan tujuan masyarakat Desa Towara Pantai. <i>Sumberdaya manusia</i> bahwa masih kurangnya sumberdaya yang dimiliki baik dari pemerintah desa maupun masyarakat dilihat dari tingkat Pendidikan yang masih tamatan SMA.</p> <p><i>Karakteristik organisasi pelaksana</i> sudah berjalan dengan baik karena dapat dilihat dari <i>Standar Operasional Prosedur</i> sudah menjadi acuan kerja yang ditegaskan oleh kepala desa Towara Pantai. <i>Sikap para pelaksana</i> sudah terbilang cukup baik namun masih ada hal yang belum mampu dilaksanakan secara maksimal, seperti pola komunikasi terhadap masyarakat yang masih kurang. <i>Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan pelaksanaan</i> belum terjalin dengan baik karena bimbingan pemerintah kecamatan dan kabupaten masih lemah sehingga pemberdayaan desa belum maksimal.</p> <p><i>Lingkungan sosial, ekonomi dan politik</i> masih kurang dalam membantu mengatasi masalah perekonomian terbukti dari masih banyaknya pengangguran didesa tersebut.</p>
3	M. Indra Maulana (2018)	Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam	Kualitatif Dengan Tujuan Mendeskripsikan Atau Melukiskan Secara Detail dan Mendalam Mengenai Proses Pelaksanaan Dana Desa Sehingga	<p>Dari hasil penelitian pengolahan dan desa yang ada di desa sinar Palembang kec. Candipuro, kab. Lampung selatan, berjalan dengan berpatokan pada petunjuk teknis yang ada sehingga pemberdayaan masyarakat dari tahun 2015 sampai pada tahun 2017 mulai meningkat dilihat dari pembangunan namun masih minim dalam peningkatan pemberdayaan perekonomian masyarakat. Kebijakan yang dilaksanakan pemerintah dalam</p>

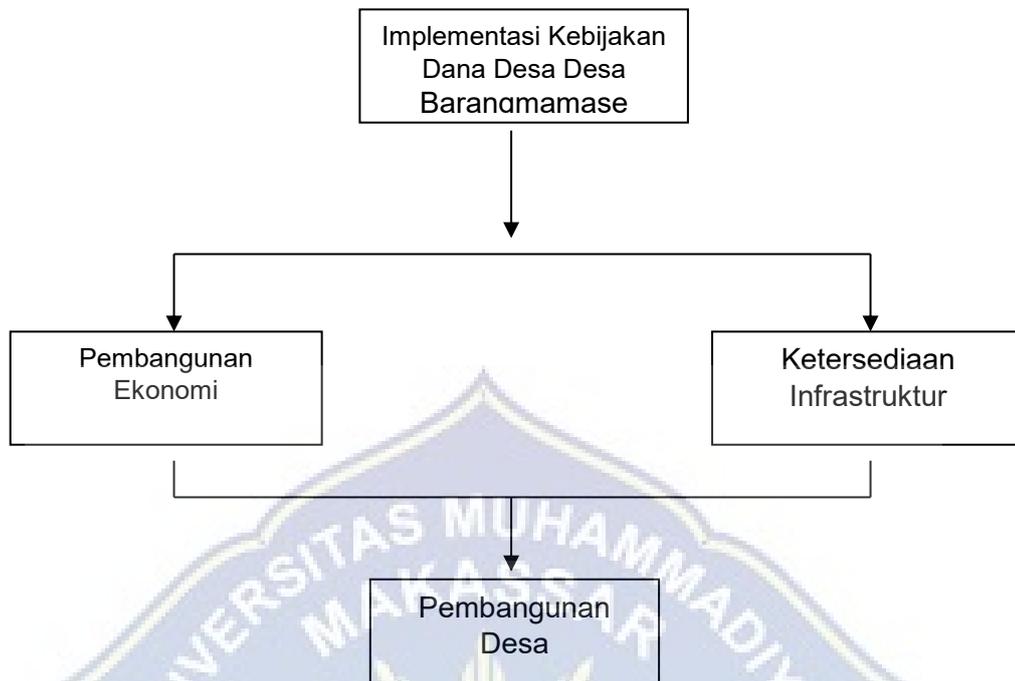
			Dapat Memberikan Peran / Kontribusi Sesuai Yang Diharapkan Pemerintah Pusat	melaksanakan tugasnya berpatokan dengan nilai dasar ekonomi islam yaitu : kepemilikan, keseimbangan, dan keadilan. Pemerintah bekerja sama dengan Lembaga yang ada di desa, serta keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah merupakan keputusan Bersama dalam musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbangdes)
4	Ratna Sari (2022)	Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Capaian Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat	Deskriptif Kualitatif	Menunjukkan bahwa perkembangan dana desa kabupaten langkat dari tahun 2018-2021 mengalami peningkatan dari tahun ketahun sebelumnya, capaian social dan ekonomi dari Indeks Desa Membangun (IDM) dan Indeks Pembangunan Desa (IPD) dalam kategori status desa tertinggal dan tingkat kesejahteraan masyarakat rendah. Pengelolaan dana desa di Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat sudah berjalan dengan baik dan proses pengelolaan dana desa sudah sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan APBDes 2022 pembangunan desa yang dilakukan dari dana desa lebih difokuskan pada bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa (BLT-DD), bidang penyelenggaraan pembangunan serta bidang penyelenggaraan pemerintahan
5	Husnul Khatimah (2020)	Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Untuk Kemaslahatan	Kualitatif Dengan Menggunakan Data Primer	Menunjukkan bahwa penggunaan dana desa untuk pembangunan yang dilakukan oleh aparatur desa sudah sangat bagus dan membantu masyarakat Gampong Lambeugak untuk meningkatkan perekonomian dan mengurangi

		Umat		kemiskinan. Penggunaan dan desa untuk pemberdayaan masyarakat belum maksimal karena program yang dilakukan di Gampong lambeugak terfokuskan untuk lelaki saja sedangkan untuk perempuan tidak ada program khusus untuk pemberdayaan perempuan. Oleh karena itu penggunaan dana desa di Gampong Lambeugak belum sepenuhnya dapat mencapai kemaslahatan bagi umat.
--	--	------	--	--

C. Kerangka Pikir

Objek dari penelitian ini adalah dana desa di desa Barangmamase Kecamatan Galesong Selatan di Kabupaten Takalar. Spesifikasi dalam penelitian ini adalah menganalisis dana desa dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur desa. Berdasarkan penelitian tersebut perlu diteliti kebijakan dari dana desa yang telah diberikan kepala desa Barangmamase Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar. Keberhasilan dana desa di desa Barangmamase Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar dilihat dari pembangunan ekonomi dan ketersediaan infrastruktur yang lebih baik.

Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk melihat pembangunan ekonomi dan ketersediaan infrastruktur yang lebih baik setelah adanya dana desa di Desa Barangmamase Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar dengan menganalisis implementasi kebijakan dana desa. Hal ini dapat dilihat pada gambar 2.1



Gambar 2.1
Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian dekriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut saya pengertian kualitatif adalah jenis penelitian yang menggunakan sistem deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis suatu data. Selain itu, penelitian kualitatif juga dijelaskan dari teori menuju data dan berakhir pada penerimaan pada teori yang ada. Menurut (sugiyono 2020) metode penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk meneliti objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai kunci. Metode kualitatif deskriptif mempelajari masalah-masalah yang ada serta tata cara kerja yang berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat,, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian berjumlah 9 orang yang ada di Desa Barangmamase.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian kualitatif ini sesuai dengan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Dana Desa bagi Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur di Desa Barangmamase Kecamatan Galesong Selatan di Kabupaten Takalar sehingga dapat diketahui manfaat dana desa bagi Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur tersebut.

C. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di desa barangmamase kecamatan galesong selatan kabupaten takalar. Situs penelitian ini dipilih dengan pertimbangan bahwa Desa Barangmamase merupakan desa yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Bontonmopo Selatan Kabupaten Gowa. Dan merupakan salah satu desa dari 13 desa di Kecamatan Galesong Selatan yang dimana merupakan salah satu desa penerima dana desa terbanyak. Peningkatan pembangunan ekonomi dan tersedianya infrastruktur yang lebih baik diharapkan mampu mendorong peningkatan perekonomian masyarakat dan meningkatkan pembangunan desa.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini kurang lebih selama 2 bulan (24 Januari – 24 Maret)

D. Jenis Dan Sumber Data

Pada penelitian ini jenis dan sumber data yang digunakan yaitu:

1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh periset untuk menjawab masalah risetnya secara khusus, sedangkan data sekunder adalah data yang didapatkan secara langsung oleh peneliti tetapi diperoleh dari dokumen, laporan-laporan, jurnal penelitian, artikel dan makalah ilmiah yang masih berkaitan dengan materi penelitian.

2. Sumber Data

Adapun sumber data primer dari penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yakni kegiatan wawancara yang menggunakan daftar pertanyaan yang jelas susunannya. Penanya tidak akan menanyakan hal selain daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti nantinya, daftar pertanyaan inilah yang menjadi pertanyaan-pertanyaan dalam proses wawancara yang dilakukan pada informan. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari sumber pustaka, badan pusat statistic dan publikasi resmi pemerintah yang berhubungan dengan penelitian ini.

E. Informan

Informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang berkompeten dan bertanggung jawab dalam memberikan informasi yang dibutuhkan penulis. Dalam penelitian ini teknik pemilihan responden atau informan yang peneliti gunakan adalah teknik *purposive sampling* yang berarti teknik pengambilan sampel secara sengaja. Maksudnya peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu. Jadi sampel diambil tidak secara acak tapi ditentukan sendiri oleh peneliti. dalam hal ini peneliti akan mengambil informan untuk dijadikan sampel sebanyak 9 orang dalam penelitian ini yang dianggap mampu memberikan data yang di inginkan. Berikut ini daftar informan.

Tabel 3.1
Daftar Informan

NO	NAMA	ALAMAT	PEKERJAAN
1.	Usman, SE	Kampung Parang	Kepala Desa Barangmamase
2.	Zulkifli, S.Pd	Barangmamase	Sekretaris Desa Barangmamase
3.	Hasriani	Kampung Parang	Bendahara Desa Barangmamase
4.	Nasaruddin	Barangmamase	Kaur Perencanaan
5.	Muh. Nurdin	Untia	Kepala Dusun Untia
6.	Nasaruddin	Popoloe	Kepala Dusun Popoloe
7.	Mustari	Barangmamase	Kepala Dusun Barangmamase
8.	Nuralamsyah	Kampung Parang	Kepala Dusun Kampung Parang
9.	Harianto	Popoloe	Petani

F. Metode Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu pengamatan langsung ke desa di Kabupaten yang menjadi subjek penelitian.
2. Wawancara, yaitu tanya jawab secara langsung kepada Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat desa yang bersamaan dengan pengisian kuesioner.
3. Dokumentasi, yaitu catatan atau dokumen resmi tertulis serta foto pengisian kuisisioner dengan pihak-pihak yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

G. Metode Analisis Data

Menurut Sugiono (2018) Analisis data merupakan suatu cara untuk menganalisa data yang diperoleh dengan tujuan untuk menguji rumusan masalah. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksud untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai sesuatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan

mendeskripsikan sejumlah variable yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Analisis deskriptif yaitu menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan objek dalam penelitian. Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan mempengaruhi suatu fenomena. Analisis deskriptif merupakan metode analisis yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal apa adanya. Setelah dilakukan pengumpulan data, maka metode deskriptif yang paling tepat untuk penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif analitik. Adapun kerja dari deskriptif analitik adalah dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut kemudian diperoleh kesimpulan.

Untuk menyajikan data agar mudah dipahami, maka langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Analysis Interactive Model* dari Miles dan Huberman, yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu pengumpulan *data (data collection)*, reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclutions*).

1. Pengumpulan Data

Pada langkah pertama yang dilakukan adalah pengumpulan data hasil wawancara, dan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data berlangsung secara terus menerus sepanjang penelitian belum diakhiri. Produk dari reduksi data adalah berupa ringkasan dari catatan lapangan, baik dari catatan awal, perluasan, maupun penambahan.

3. Penyajian Data

Sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan ditarik semenjak peneliti menyusun pencatatan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Desa Barangmamase adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan yang berbatasan langsung dengan Kelurahan Tindang Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa.

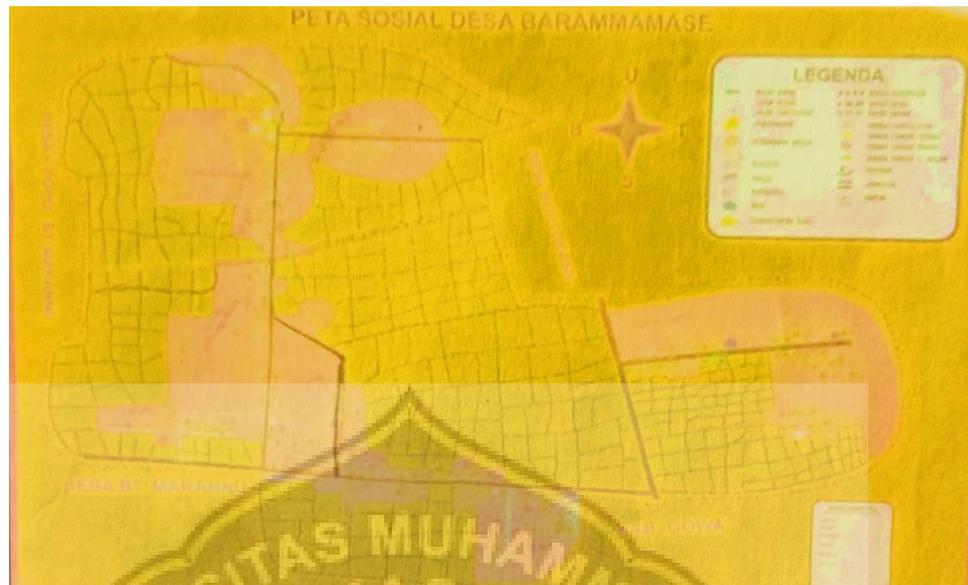
Desa Barangmamase terdiri dari 4 dusun yaitu dusun popoloe, dusun barangmamase, dusun untia dan dusun kampung parang dengan luas wilayah sekitar 164 Ha.

Tabel 4.1 Batas Wilayah Desa Barangmamase

Wilayah	Perbatasan
Selatan	Desa Mangindara
Barat	Desa Bontomarannu, Desa Popo
Utara	Desa Bontokassi
Timur	Kelurahan Tindang Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa

Sumber: RPJM Desa Barangmamase

Desa Barangmamase terletak di wilayah Pemerintahan Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar, jarak dari ibukota kecamatan 1,9 km dan jarak dari ibukota kabupaten 9,4 km. jika menggunakan kendaraan bermotor maka tempuh ke kota kecamatan 4 menit, dan 20 menit menuju ibu kota kabupaten. Luas wilayah Desa Barangmamase 164 Ha².



Sumber : RPJM Desa Barangmamase

Gambar 4.1 Peta Desa Barangmamase

a. Visi Dan Misi Desa Barangmamase

1) Visi

“Terwujudnya Pemerintahan Desa Barangmamase Yang Semakin Maju, Transparan, Aman, Tenteram, Religius, Menuju Masyarakat Desa Sejahtera Dan Bermartabat“

2) Misi

- a. Memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang efektif, demokratis, dan meningkatkan kemandirian ekonomi, pertanian dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Transparan dan akuntabel serta mendorong terciptanya suasana desa yang aman, tentera, damai dan mendorong berkembangnya kehidupan beragama dan peningkatan pendidikan bagi seluruh masyarakat.

- c. Menciptakan kondisi masyarakat desa barangmamase yang aman, tertib dan rukun dalam berkehidupan bermasyarakat serta percepatan pembangunan infrastruktur dan akses layanan dasar untuk meningkatkan derajat kehidupan bagi masyarakat serta pelestarian lingkungan hidup dan potensi alam untuk mewujudkan desa wisata yang berwawasan lingkungan.

b. Kondisi Demografis

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. Laju pertumbuhan adalah angka yang menunjukkan persentase penambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Kepadatan penduduk adalah rasio banyaknya penduduk per kilometer persegi (BPS, 2021).

Jumlah penduduk desa barangmamase pada tahun 2020-2023 sebanyak jiwa jumlah penduduk setiap dusun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Banyak Penduduk Desa Barangmamase Tahun 2020-2023

Jenis	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
P	1.197	1.221	1.202	1.285
L	1.183	1.192	1.142	1.281
Total	2.380	2.413	2.344	2.566

Sumber : RPJM Desa Barangmamase

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dari kurung waktu 4 tahun jumlah penduduk di Desa Barangmamase mengalami kenaikan. Ini ditujukan pada tahun 2023 dengan jumlah penduduk 2.566 jiwa.

c. Sarana Pendidikan

Kondisi Desa Barangmamase dari aspek pendidikan dapat digambarkan berdasarkan sarana dan prasarana Pendidikan yang ada. Untuk menggambarkan kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.3 Sarana Pendidikan Desa Barangmamase

Dusun	TK/ RA	SD/ MI	SMP/MTS	SMA/SMK/MA	Taman Bacaan
Popoloe	-	-	-	-	1
Barangmamase	1	1	-	-	-
Kampung Parang	1	-	-	-	-
Untia	-	-	-	-	-
Total	2	1	-	-	1

Sumber : RPJM Desa Barangmamase

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sarana Pendidikan yang ada di Desa Barangmamase berjumlah 4 buah. Hal ini menunjukkan bahwa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP/MTS dan seterusnya penduduk Desa Barangmamase harus mencari sekolah di luar Desa Barangmamase.

B. Hasil Penelitian

1. Implementasi Kebijakan Dana Desa Bagi Pembangunan Ekonomi Dan Infrastruktur di Kabupaten Takalar

Berdasarkan analisis isi wawancara terhadap 9 informan atau narasumber dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Dana Desa Bagi Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur di Desa Barangmamase Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar sudah berjalan dengan cukup baik. Hal tersebut telah dibuktikan dari pernyataan Bapak Harianto yang bekerja sebagai petani menjelaskan bahwa:

“Sejauh ini terkait perkembangan pembangunan di desa barangmamase baik itu dari pembangunan ekonomi maupun infrastruktur saya rasa cukup berdampak baik terhadap masyarakat, seperti pembangunan jalan tani, saluran air, bantuan modal usaha, pelatihan kader, bantuan alat pertanian yang dimana di desa barangmamase warganya itu lebih banyak yang bekerja atau kesehariannya sebagai petani dan dengan adanya pmbangunan tersebut itu lebih memudahkan masyarakat dalam bertani dan memudahkan ketika menanam maupun menanen padi.” 06 Maret 2024

Jadi peran pemerintah desa dan bentuk pengawasan masyarakat terhadap Implementasi kebijakan dana desa terhadap program pembangunan ekonomi dan Infrastruktur di desa barangmamase sudah cukup berjalan dengan baik.

Kemudian dari pernyataan Bapak Usman, SE sebagai Kepala Desa Barangmamase terkait implementasi kebijakan dana desa bagi pembangunan ekonomi dan infrastruktur di Desa Barangmamase menjelaskan bahwa:

“Untuk pelaksanaan program pembangunan di Desa Barangmamase tentunya kami menunggu dana desa cair terlebih dahulu baru kemudian melaksanakan program tersebut dan kendala lain mungkin cuaca. Kemudian untuk pembangunan ekonomi dan infrastruktur sudah ada beberapa seperti pembangunan jalan tani, perbaikan jalan dusun, pembangunan saluran air, pembagian bantuan alat pertanian ke petani dan untuk pembangunan infrastruktur itu dilakukan di pertengahan tahun.” 05 Maret 2024.

Berikut ini adalah program pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur Desa Barangmamase yang terealisasi tahun 2020-2023 yang dananya bersumber dari Dana Desa yaitu :

Tabel 4.4 Program Pembangunan Ekonomi Dan Infrastruktur Di Desa Barangmamase Tahun 2020-2023

No	Nama Program	Lokasi	Dana Yang Dipakai	Tahun
1.	Penanganan Covid 19	Desa Barangmamase	Rp. 472.224.000	2020
2.	Pembangunan Jalan Baru	Dusun Barangmamase	Rp. 100.000.000	2020
3.	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	Desa Barangmamase	Rp. 529.000.000	2021
4	Peningkatan Jalan Desa (Taman Bunga Di Setiap Poros)	Semua Dusun	Rp. 10.000.000	2021
5	Pembangunan Kandang Sapi	Semua Dusun	Rp. 80.000.000	2021
6	Peningkatan Sambungan Air Rumah Tangga	Semua Dusun	Rp. 10.000.000	2021
7	Pemberian Bantuan Bibit Pohon Dan Buah-Buahan	Semua Dusun	Rp. 50.000.000	2022
8	Pembangunan Jalan Tani	Semua Dusun	Rp. 237.000.000	2022
9.	Pemberian Bantuan Ternak Sapi, Ayam, Itik Dan Kambing	Semua Dusun	Rp. 230.000.000	2022
10.	Insentif Guru TK/TPA	Desa Barangmamase	Rp. 49.000.000	2022
11.	Pembangunan Paving Blok	Semua Dusun	Rp. 187.500.000	2022
12.	Pengadaan Taman Baca, Perpustakaan, Rumah Layak Anak Dan Rumah Belajar Dg. Sanre	Desa Barangmamasse	Rp. 100.000.000	2022
13.	Pembangunan Saluran Irigasi	Semua Dusun	Rp. 115.000.000	2023

14.	Peningkatan Energi Alternatif Lampu Jalan, Tenaga Surya Dan Metera	Semua Dusun	Rp. 100.000.000	2023
15.	Pelatihan Para Pengurus BUMDES	Desa Barangmamase	Rp. 50.000.000	2023
16.	Pelatihan Penyelenggara Jenazah	Desa Barangmamase	Rp. 10.000.000	2023
17.	Sosialisasi Tentang Perencanaan Pembangunan	Desa Barangmamase	Rp. 10.000.000	2023
18.	Pelatihan Kader	Desa Barangmamase	Rp. 80.000.000	2023
19.	Insentif Guru TK/PAUD	Desa Barangmamase	Rp. 58.500.000	2023
20.	Pembangunan Jalan Beton 1000 Meter	Desa Barangmamase	Rp. 125.000.000	2023
21.	Pembangunan Jembatan	Dusun Popoloe, Dusun Barangmamase	Rp. 50.000.000	2023

Sumber : APBDes Desa Barangmamase

Dari program Pembangunan Ekonomi yang dilaksanakan pemerintah desa dalam upaya menciptakan dan membuka banyak kesempatan bagi masyarakat agar dapat memanfaatkan potensi yang ada di Desa Barangmamase sehingga dari Program Pembangunan Ekonomi, masyarakat dapat mengembangkan lebih banyak lagi peluang untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di Desa Barangmamase.

Dari pernyataan Bapak Zulkifli, S.Pd sebagai Sekretaris Desa Barangmamase menjelaskan bahwa:

“Kalau selama ini, selama ada dana desa sangat membantu sekali untuk prasarana-prasarana yang ada di desa seperti di bidang pembangunan ekonomi adanya bantuan alat pertanian dan di infrastruktur, di bidang pertanian itu sangat memadai untuk jalan tani dalam membantu akses petani untuk menanam padi dan memanen padinya. Kemudian pada saat pelaksanaan pembangunan pastinya kami melibatkan masyarakat.” 05 Maret 2024.

Untuk pelaksanaan kebijakan dana desa terhadap program

pembangunan ekonomi dan infrastruktur dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di desa barangmamase sudah berjalan dengan baik. Kemudian untuk kendala pertanggung jawaban atau pelaporan administrasi mengenai penggunaan dana desa bagi pembangunan ekonomi dan infrastruktur di Desa Barangmamase menurut Hasriani sebagai Bendahara Desa Barangmamase menjelaskan bahwa :

“Untuk kendala selama ini belum ada, karena dalam bentuk pertanggung jawaban laporan anggaran pendapatan dan belanja desa dan dilaksanakan setiap tahun dan kami juga memasang spanduk transparansi depan kantor. Untuk pembangunan ekonomi seperti diadakannya pelatihan kader, bantuan alat pertanian, modal usaha dan untuk pembangunan infrastruktur seperti pembuatan jalan tani, jalan dusun baru dan saluran irigasi untuk masyarakat di Desa Barangmamase” 05 Maret 2024

Jadi untuk pelaporan administrasi atau pertanggung jawaban pemerintah desa terkait penggunaan dana desa untuk program pembangunan ekonomi dan infrastruktur di desa barangmamase dilakukan secara transparan.

Dari pernyataan Bapak Nasaruddin sebagai Kaur Perencanaan terkait program ekonomi dan infrastruktur yang saat ini terealisasi di desa Barangmamase menjelaskan bahwa :

“Untuk Pembangunan Infrastruktur sudah dilakukan, seperti contohnya jalan tani di beberapa titik di desa barangmamase kemudian pembangunan jalan dusun, pembangunan saluran air atau drainase dan baru-baru ini di ada beberapa titik yang dipasang lampu jalan. Kemudian di pembangunan ekonomi adanya pelatihan-pelatihan kader, bantuan modal usaha dan bantuan alat pertanian” 09 Maret 2024

Dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat yaitu dengan adanya pembangunan infrastruktur membuat masyarakat lebih terbantu. Pembangunan Infrastruktur yang sudah teralisasi tersebut sejalan dengan

keinginan masyarakat agar lebih memfokuskan pada pembangunan fisik sehingga dapat bermanfaat dan banyak membantu masyarakat Desa Barangmamase.

Berdasarkan pernyataan dari Nuralamsyah sebagai Kepala Dusun Kampung Parang terkait dampak dari program pembangunan ekonomi dan infrastruktur di Desa Barangmamase menjelaskan bahwa :

“Untuk dampak positifnya adanya bantuan seperti bantuan modal usaha, bantuan alat pertanian, pelatihan kader dan pengurus BUMDES, pembangunan jalan tani dan saluran air untuk lebih memudahkan petani.” 09 Maret 2024.

Kemudian untuk waktu pelaksanaan program pembangunan ekonomi dan infrastruktur di Desa Barangmamase dari pernyataan Bapak Nasaruddin Sebagai Kepala Dusun Popoloe menjelaskan bahwa:

“Pelaksanaan program pembangunan ekonomi dan infrastruktur di desa barangmamase seperti pembuatan jalan dusun baru, pengerjaan saluran irigasi dan bantuan langsung tunai (BLT) dilaksanakan ketika dana desa sudah cair dan dikerjakan atau dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.” 10 Maret 2024

Terkait manfaat ataupun dampak dari implementasi kebijakan dana desa bagi program pembangunan ekonomi dan infrastruktur di desa barangmamase, Bapak Muhammad Nurdin sebagai Kepala Dusun Untia Menjelaskan Bahwa:

“Dengan terealisasinya pembangunan ini berdampak positif kepada masyarakat seperti diperbaiki dan pembangunan jalan dusun baru, pengadaan bantuan alat pertanian, pemberian modal usaha bagi masyarakat” 10 Maret 2024

Kemudian dari pernyataan Bapak Mustari sebagai Kepala Dusun Barangmamase terkait keterlibatan masyarakat dalam mengontrol

pembangunan di Desa Barangmamase Menjelaskan Bahwa:

“Ya, tentunya melibatkan masyarakat setempat di setiap pembangunan ekonomi dan infrastruktur di desa ini, masyarakat dilibatkan dalam hal menjaga kebersihan saluran air atau drainase dan mengajak masyarakat untuk ikut dalam kegiatan sosialisasi ataupun pelatihan-pelatihan yang diadakan di desa.” 10 Maret 2024

Untuk pelaksanaan program pembangunan di Desa Barangmamase dilaksanakan ketika dana desa sudah cair dan pengerjaan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan. Manfaat yang didapatkan dari Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur sangat berguna dalam membantu kegiatan masyarakat dari berbagai aspek. Seluruh program Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur yang dilaksanakan pemerintah Desa Barangmamase sebagai upaya membantu masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari dari bantuan modal usaha, bantuan alat pertanian, infrastruktur jalan dan Infrastruktur lainnya sehingga masyarakat di Desa Baragmamase dapat terbantu dan memudahkan masyarakat saat beraktifitas sehari-hari.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis wawancara dan pengumpulan data dari setiap informan yang telah diuraikan di atas dapat dirangkum bahwa:

1. Implementasi Kebijakan Dana Desa Bagi Pembangunan Ekonomi

Implementasi Kebijakan Dana Desa bagi Pembangunan Ekonomi menjadi salah satu program pemerintah Desa Barangmamase dalam mengupayakan agar masyarakat dapat memanfaatkan potensi yang ada di Desa Barangmamase dalam menciptakan kegiatan yang memiliki nilai ekonomi seperti

produktivitas tanaman pangan, membuat usaha atau kreatifitas yang bisa dikembangkan jauh lebih baik lagi kedepan sehingga pendapatan masyarakat dapat semakin meningkat dan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik.

Dari program Pembangunan Ekonomi yang dilaksanakan pemerintah desa dalam upaya menciptakan dan membuka banyak kesempatan bagi masyarakat agar dapat memanfaatkan potensi yang ada di Desa Barangmamase sehingga dari Program Pembangunan Ekonomi, masyarakat dapat mengembangkan lebih banyak lagi peluang untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di Desa Barangmamase. Hal ini dibuktikan dari ke ikut sertaan masyarakat dalam musyawarah pada pengambilan suatu keputusan dan peran masyarakat dalam mengawasi setiap program yang akan dijalankan oleh pemerintah desa. Maka dapat dijelaskan bahwa program Pembangunan Ekonomi di Desa Barangmamase sudah berjalan dengan cukup baik.

2. Implementasi Kebijakan Dana Desa Bagi Infrastruktur

Implementasi Kebijakan Dana Desa Bagi Infrastruktur dapat dinilai secara langsung karena bentuk dari Infrastruktur memiliki wujud dan fisik yang ada sehingga Infrastruktur merupakan keuntungan yang didapatkan bagi masyarakat dari fasilitas jalan, drainase, lampu jalan yang baik sehingga masyarakat dapat dengan mudah dan nyaman saat berkendara di Desa Barangmamase Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar.

Manfaat yang didapatkan dari Pembangunan Infrastruktur

sangat berguna dalam membantu kegiatan masyarakat dari berbagai aspek. Seluruh program Infrastruktur yang dilaksanakan pemerintah Desa Barangmamase sebagai upaya membantu masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari dari Infrastruktur jalan dan Infrastruktur lainnya sehingga masyarakat di Desa Baragmamase dapat terbantu dan memudahkan masyarakat saat beraktifitas sehari-hari.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ihdina Dewi 2021. Efektivitas Dana Desa Bagi Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur di Desa Bonto Jai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng. Hasil penelitian ini bahwa Implementasi Kebijakan Dana Desa Bagi Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur di Desa Barangmamase sudah cukup berjalan baik, dimana dalam pelaksanaan program pembangunan dilaksanakan dan terselesaikan tepat waktu dan tepat sasaran. Kemudian program tersebut telah atau sudah pernah disosialisasikan terlebih dahulu dalam musyawarah desa sebelum melaksanakan program pembangunan. Kemudian untuk perencanaan program dan pelaksanaannya dilapangan sudah bertahap dan sesuai dengan ketentuannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Dana Desa Bagi Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur di Desa Barangmase sudah cukup berjalan baik, dimana dalam pelaksanaan program pembangunan dilaksanakan dan terselesaikan tepat waktu dan tepat sasaran. Kemudian program tersebut telah atau sudah pernah disosialisasikan terlebih dahulu dalam musyawarah desa sebelum melaksanakan program pembangunan, kemudian untuk perencanaan program dan pelaksanaannya dilapangan sudah bertahap dan sesuai dengan ketentuannya..

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Perlunya transparan dalam anggaran pembangunan ekonomi dan infrastruktur
2. Perlunya perawatan secara berkala terhadap infrastruktur-infrastruktur yang telah dibangun.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. (2019). Implementasi Kebijakan Dana Desa Di Desa Seppong Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene. *S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya*, 1–9.
- Canning Dan Pedroni. 2004. *Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jangka Panjang*. (<https://econpapers.repec.org/paper/wilwileco/2004-04.htm>)
- Hapsari, Tanjung, 2011. "Pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di indonesia". *Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta*
- Hapsari, Tanjung, 2011. "Pengaruh Infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia". *Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta*.
- Hulu, Y., Hamdani, R., Muhammad, H., & Nasution, A. (2018). *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. 10(1), 146–154. <http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis>
- Ihdina Dewi, 2021 "Efektivitas Dana Desa Bagi Pembangunan Ekonomi Dan Infrastruktur Desa Bontojai Kecamatan Bissappu Di Kabupaten Bantaeng". *Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar*.
- Irmansyah, I., Mustafa, S. W., & Hamid, R. S. (2021). Efektivitas Kebijakan Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 4(2), 1086–1095. <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i2.479>
- Mohi, E. M. H., Nggilu, R., Kadek, I., & Arsana, S. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kabupaten Bone Bolango. *Jurnal Agama Sosiasal Dan Budaya*, 5(4), 2599–2473.
- Ramly, A. R., Wahyuddin, Mursyida, J., & Mawardati. (2017). Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Pengelolaan dan Peningkatan Potensi Desa (Studi Kasus Kec Kuala Kabupaten Nagan Raya). *Seminar Nasional II USM 2017*, 1(Oktober), 379–392.
- _____. 2014. *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa*, Jakarta.
- _____. 2014. *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa*, Jakarta.
- _____. 2014. *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*, Jakarta

- _____. 2014. *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa*, Jakarta.
- _____. 2015. *Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*.
- _____. 2015. *Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016*.
- _____. 2003. *Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.
- Robbins, Stephen P. Coulter, Mary. 2016. *Managemen*. Pearson Education: London.
- Sadono Sukirno. 2016. *Mikroekonomi Teori Pengantar*. Jilid III. Rajagrafindo: Jakarta.
- Subandi. 2011. *“Ekonomi Pembangunan (cetakan kesatu)”*. Bandung: Alfabeta
- Solichin, & Akmal, S. (2018). Persepsi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi Di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma). *Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik (Mimbar)*, 7(2), 20–26.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV
- Tumbel, T. M. 2014. *Analisis Bantuan Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan)*. Jurnal LPPM Bidang EksosBudKum, Volume 1 No. 2.
- Yunia, Novita Sari, 2017. *Efektivitas Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Infrastruktur Pedesaan Di Kabupaten Langkat*. Skripsi, Universitas Sumatera Utara, Medan

L

A

M

P

I

R

A

N



LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA

A. Instrumen Penelitian

Adapun daftar pertanyaan yang akan diajukan pada proses wawancara adalah sebagai berikut :

1. Berapa besar anggaran dana desa yang diterima oleh Desa Barangmamase setiap tahunnya?

Jawab :

Kepala Desa : Untuk dana desa yang diterima itu tiap tahun berbeda

Bendahara Desa : Kalau untuk anggaran dana desa tiap tahunnya itu beda-beda yang diterima.

2. Apakah ada kendala atau kesulitan dari pemerintah Desa dalam membuat pertanggungjawaban administrasi?

Jawab :

Kepala Desa : Sejauh belum ada kendala tentang pertanggungjawaban administrasi

Sekretaris Desa : Belum ada

Bendahara Desa : Tidak ada, karena dalam bentuk pertanggung jawaban laporan anggaran pendapatan dan belanja desa dan dilaksanakan setiap tahun dan kami juga memasang spanduk transparansi depan kantor.

3. Apakah bapak terjun langsung dalam mengawasi proses pelaksanaan pembangunan ekonomi dan infrastruktur?

Jawab :

Kepala Desa : Ya, saya terjun langsung

Kaur Perencanaan : iya, pastinya kami dari aparat desa turun langsung melihat pembangunan yang dilaksanakan.

4. Kendala apa saja dalam pelaksanaan program pembangunan ini?

Jawab :

Kepala Desa : Ya, tentunya kami menunggu dana desa cair terlebih dahulu baru kemudian melaksanakan program tersebut dan kendala lain mungkin cuaca, itu saja.

Kaur Perencanaan : Ya mungkin kendala cuaca, menunggu dana desa cair dan tentunya ada beberapa kendala dalam pembebasan lahan warga yang terkena pembanguna baik itu jalan tani, dan drainase.

5. Kapan saja dilaksanakan program pembangunan ekonomi dan infrastruktur di desa ini?

Jawab :

Kepala Desa : Untuk pelaksanaan program pembangunan di Desa Barangmamase tentunya kami menunggu dana desa cair terlebih dahulu baru kemudian melaksanakan program tersebut dan kendala lain mungkin cuaca. Dan untuk pembangunan infrastruktur itu dilakukan di pertengahan tahun

Kepala Dusun Barangmamase : Program pembangunan ini dilaksanakan ketika dana desa sudah cair dan biasanya itu dilaksanakan di pertengahan tahun.

Kepala Dusun Untia : Ya, program ini dilakukan ketika dana desa sudah turun dan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Kepala Dusun Popoloe : Ya, program ini dilaksanakan ketika dana desa sudah turun dan dikerjakan sesuai dengan jadwal.

Kepala Dusun Kampung Parang : Pembangunan ini dilakukan ketika dana desa sudah turun.

6. Apakah sudah ada pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang telah direalisasikan dan sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya?

Jawab :

Kepala Desa : Iya, sudah ada beberapa seperti pembangunan jalan tani, perbaikan jalan dusun, pembangunan saluran air, pembagian bantuan alat pertanian ke petani.

Kaur Perencanaan : Iya sudah banyak, seperti contohnya jalan tani di beberapa titik di desa barangmase kemudian pembangunan jalan dusun, pembangunan saluran air atau drainase dan baru-baru ini di ada beberapa titik yang dipasang lampu jalan.

7. Bagaimana tanggapan bapak tentang pembangunan ekonomi dan infratraktur di desa ini?

Jawab :

Sekretaris Desa : Kalau selama ini, selama ada dana desa sangat membantu sekali untuk prasarana-prasarana yang ada didesa seperti dibidang pembangunan ekonomi adanya bantuan alat pertanian dan di infrastruktur, dibidang pertanian itu sangat memadai untuk jalan tani dalam membantu akses petani untuk menanam padi dan memanen padinya. Kemudian pada saat pelaksanaan pembangunan pastinya kami melibatkan masyarakat.

Masyarakat : Iya, tanggapan saya sejauh ini terkait perkembangan pembangunan di desa barangmase baik itu dari pembangunan ekonomi maupun infrastruktur saya rasa cukup berdampak baik terhadap

masyarakat, seperti pembangunan jalan tani, saluran iar, bantuan alat pertanian yang dimana di desa barangmamase warganya itu lebih banyak yang bekerja atau kesehariannya sebagai petani dan dengan adanya pembangunan tersebut itu lebih memudahkan masyarakat dalam bertani dan memudahkan ketika menanam maupun menanen padi.

8. Bagaimana proses sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa terhadap masyarakat dalam merencanakan program tersebut?

Jawab :

Bendahara Desa : Dengan mengadakan musyawarah desa dan kami juga memasang spanduk transparansi depan kantor.

Masyarakat : iya, seperti diadakannya musyawarah desa.

9. Apa dampak positif dan negatif dari pembangunan ekonomi dan infrastruktur di desa ini?

Jawab :

Kepala Dusun Barangmamase : Dampak positifnya seperti dengan adanya jalan tani memudahkan masyarakat dalam menanam dan memanen padinya.

Kepala Dusun Popoloe : Tentunya lebih ke dampak positif bagi masyarakat dengan adanya pembangunan.

Kepala Dusun Untia : Lebih kedampak positif seperti di perbaikan dan pembangunan jalan dusun baru itu lebih memudahkan masyarakat dalam beraktifitas.

Kepala Dusun Kampung Parang : Untuk dampak positifnya seperti di pembangunan jalan tani dan saluran air itu lebih memudahkan petani.

Masyarakat : saya rasa cukup berdampak terhadap masyarakat, seperti adanya pembangunan jalan tani, drainase, bantuan alat pertanian. dimana di desa barangmamase itu masyarakatnya lebih banyak yang bekerja atau kesehariannya sebagai petani dan dengan adanya pembangunan tersebut lebih membantu masyarakat.

10. Apakah setiap pembangunan ekonomi dan infrastruktur ini, masyarakat dilibatkan dalam mengontrol pembangunan tersebut?

Jawab :

Sekretaris Desa : iya, pastinya kami melibatkan masyarakat.

Kepala Dusun Barangmamase : Ya, tentunya melibatkan masyarakat setempat.

Kepala dusun Popoloe : Melibatkan masyarakat

Kepala Dusun Untia : Iya, tentunya kami melibatkan masyarakat dalam setiap pembangunan.

Kepala Dusun Kampung Parang : Ya, kami melibatkan tentunya masyarakat.

Masyarakat : Ya, pastinya kami sebagai masyarakat terlibat dengan adanya dilaksanakan pembangunan di desa ini.

B. Hasil Transkrip Wawancara

No	Coding	Transkrip
	Kepala Desa	Untuk dana desa yang diterima itu tiap tahun berbeda
	Bendahara Desa	Kalau untuk anggaran dana desa tiap tahunnya itu beda-beda yang diterima.
	Kepala Desa	Sejauh belum ada kendala tentang pertanggung jawaban administrasi
	Sekretaris Desa	Belum ada
	Bendahara Desa	Tidak ada, karena dalam bentuk pertanggung jawaban laporan anggaran pendapatan dan belanja desa dan dilaksanakan setiap tahun dan kami juga memasang spanduk

		<i>transparansi depan kantor.</i>
	<i>Kepala Desa</i>	<i>Ya, saya terjun langsung</i>
	<i>Kaur Perencanaan</i>	<i>iya, pastinya kami dari aparat desa turun langsung melihat pembangunan yang dilaksanakan</i>
	<i>Kepala Desa</i>	<i>Ya, tentunya kami menunggu dana desa cair terlebih dahulu baru kemudian melaksanakan program tersebut dan kendala lain mungkin cuaca, itu saja.</i>
	<i>Kaur Perencanaan</i>	<i>Ya mungkin kendala cuaca, menunggu dana desa cair dan tentunya ada beberapa kendala dalam pembebasan lahan warga yang terkena pembangunan baik itu jalan tani, dan drainase.</i>
	<i>Kepala Desa</i>	<i>Kalau untuk pembangunan infrastruktur itu dilakukan di pertengahan tahun</i>
	<i>Kepala Dusun Barangmamase</i>	<i>Program pembangunan ini dilaksanakan ketika dana desa sudah cair dan biasanya itu dilaksanakan di pertengahan tahun.</i>
	<i>Kepala Dusun Untia</i>	<i>Ya, program ini dilakukan ketika dana desa sudah turun dan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.</i>
	<i>Kepala Dusun Popoloe</i>	<i>Ya, program ini dilaksanakan ketika dana desa sudah turun dan dikerjakan sesuai dengan jadwal.</i>
	<i>Kepala Dusun Kampung Parang</i>	<i>Pembangunan ini dilakukan ketika dana desa sudah turun.</i>
	<i>Kepala Desa</i>	<i>Iya, sudah ada beberapa seperti pembangunan jalan tani, perbaikan jalan dusun, pembangunan saluran air, pembagian bantuan alat pertanian ke petani.</i>
	<i>Kaur Perencanaan</i>	<i>Iya sudah banyak, seperti contohnya jalan tani di beberapa titik di desa barangmamase kemudian pembangunan jalan dusun, pembangunan saluran air atau drainase dan baru-baru ini di ada beberapa titik yang dipasang lampu jalan.</i>
	<i>Sekretaris Desa</i>	<i>Kalau selama ini, selama ada dana desa sangat membantu sekali untuk prasarana-prasaran yang ada didesa seperti dibidang pembangunan dan dibidang pertanian itu sangat memadai untuk jalan tani dalam membantu akses petani untuk menanam padi dan memanen padinya.</i>
	<i>Masyarakat</i>	<i>Iya, tanggapan saya sejauh ini terkait perkembangan pembangunan di desa barangmamase baik itu dari pembangunan ekonomi maupun infrastruktur saya rasa cukup berdampak baik terhadap masyarakat, seperti pembangunan jalan tani, saluran air, bantuan modal usaha, pelatihan kader, bantuan alat pertanian yang dimana di desa barangmamase warganya itu lebih banyak yang bekerja atau kesehariannya sebagai petani dan dengan adanya pembangunan tersebut itu lebih</i>

		<i>memudahkan masyarakat dalam bertani dan memudahkan ketika menanam maupun menanen padi.</i>
	<i>Bendahara Desa</i>	<i>Dengan mengadakan musyawarah desa dan kami juga memasang spanduk transparansi depan kantor.</i>
	<i>Masyarakat</i>	<i>iya, seperti diadakannya musyawarah desa.</i>
	<i>Kepala Dusun Barangmamase</i>	<i>Dampak positifnya seperti dengan adanya jalan tani memudahkan masyarakat dalam menanam dan memanen padinya.</i>
	<i>Kepala Dusun Popoloe</i>	<i>Tentunya lebih ke dampak positif bagi masyarakat dengan adanya pembangunan.</i>
	<i>Kepala Dusun Untia</i>	<i>Lebih kedampak positif seperti di perbaikan dan pembangunan jalan dusun baru itu lebih memudahkan masyarakat dalam beraktivitas.</i>
	<i>Kepala Dusun Kampung Parang</i>	<i>Untuk dampak positifnya seperti di pembangunan jalan tani dan saluran air itu lebih memudahkan petani.</i>
	<i>Masyarakat</i>	<i>saya rasa cukup berdampak terhadap masyarakat, seperti adanya pembangunan jalan tani, drainase, bantuan alat pertanian. dimana di desa barangmamase itu masyarakatnya lebih banyak yang bekerja atau kesehariannya sebagai petani dan dengan adanya pembangunan tersebut lebih membantu masyarakat.</i>
	<i>Sekretaris Desa</i>	<i>Sekretaris Desa : iya, pastinya kami melibatkan masyarakat.</i>
	<i>Kepala Dusun Barangmamase</i>	<i>Ya, tentunya melibatkan masyarakat setempat.</i>
	<i>Kepala dusun Popoloe</i>	<i>Melibatkan masyarakat</i>
	<i>Kepala Dusun Untia</i>	<i>Iya, tentunya kami melibatkan masyarakat dalam setiap pembangunan.</i>
	<i>Kepala Dusun Kampung Parang</i>	<i>Ya, kami melibatkan tentunya masyarakat.</i>
	<i>Masyarakat</i>	<i>Ya, pastinya kami sebagai masyarakat terlibat dengan adanya dilaksanakan pembangunan di desa ini.</i>

LAMPIRAN 2

DOKUMENTASI PENELITIAN



(Kantor Desa Barangmamase)



(Wawancara Kepala Desa Barangmamase)



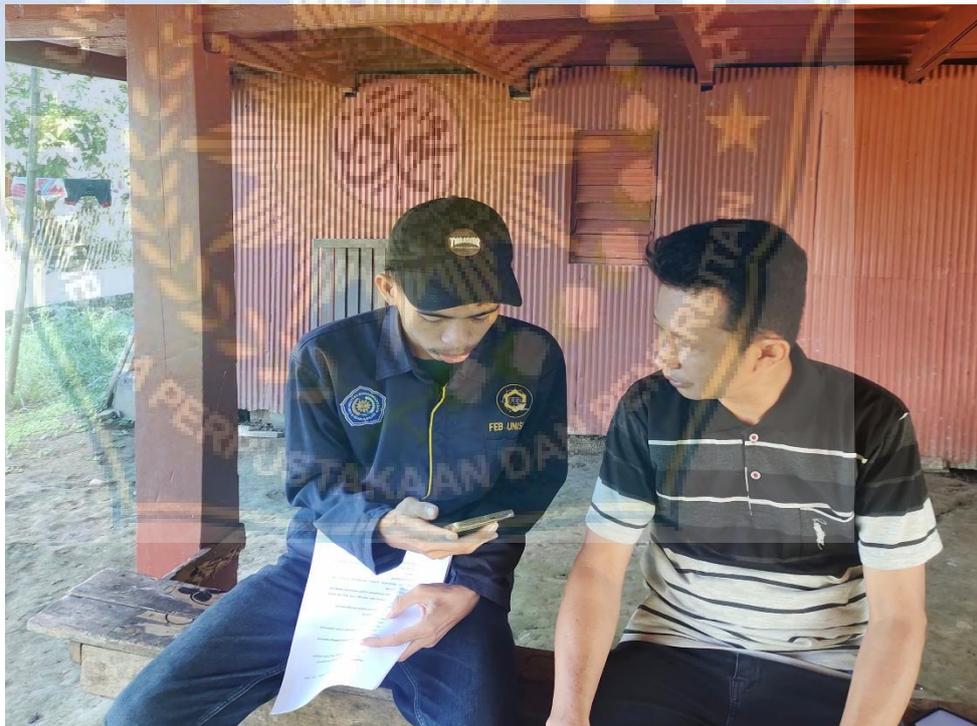
(Wawancara Sekretaris Desa Barangmamase)



(Wawancara Bendahara Desa Barangmamase)



(Wawancara Kepala Dusun Kampung Parang)

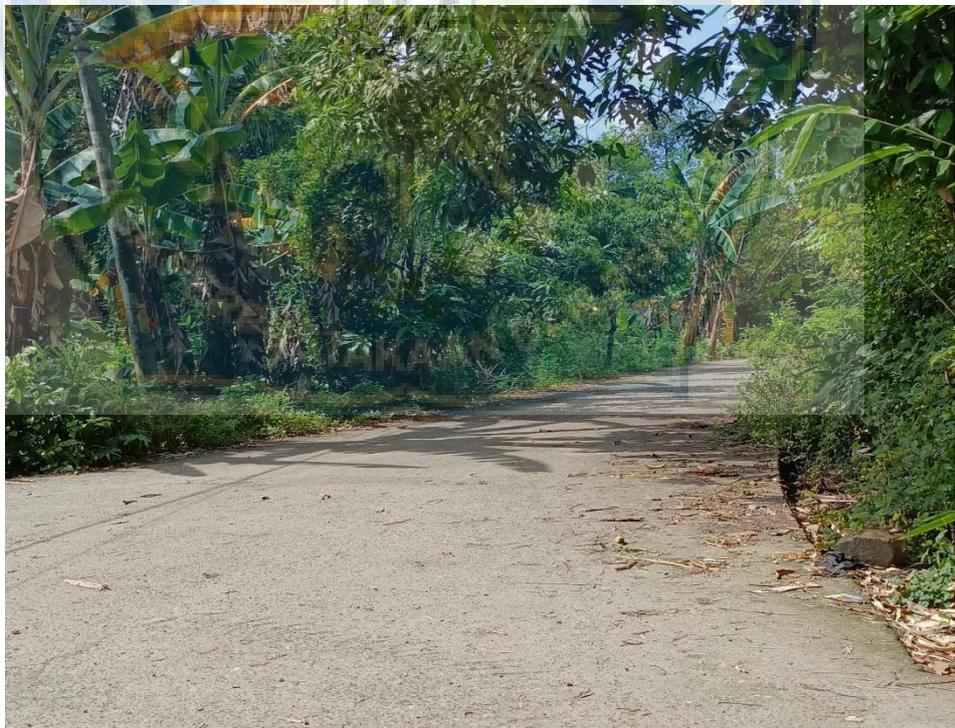


(Wawancara Kaur Perencanaan Desa Barangamamase)



(Wawancara Masyarakat)





LAMPIRAN 3



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 37/05/A.2-II/I/45/2024 Makassar, 18 Januari 2024

Lamp : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar

Di-

Tempat

Dengan Hormat

Dalam rangka proses penelitian dan penulisan skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD ADNAN JAKARIA

Stambuk : 105711101820

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

Judul Penelitian : Implementasi Kebijakan Dana Desa Bagi Pembangunan
 Ekonomi Dan Infrastruktur Di Kabupaten Takalar

Dimohon kiranya mahasiswa tersebut dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian
 sesuai tempat mahasiswa tersebut melakukan penelitian

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terimakasih.

Dekan,

Dr. H. Andi Jah'an, S.E., M.Si

NIDN: 051 507

Tembusan:

1. Rektor Unismuh Makassar
2. Arsip

LAMPIRAN 4



LAMPIRAN 5





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Muhammad Adnan Jakaria

Nim : 105711101820

Program Studi : Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	7 %	10 %
2	Bab 2	17 %	25 %
3	Bab 3	8 %	10 %
4	Bab 4	8 %	10 %
5	Bab 5	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 29 Juli 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



BAB I Muhammad Adnan Jakaria 1057111101820

ORIGINALITY REPORT

7%	7%	5%	5%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Student Paper	3%
2	media.neliti.com Internet Source	2%
3	birokrasimaju.blogspot.com Internet Source	2%

Exclude quotes Off Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off

BAB II Muhammad Adnan Jakaria 105711101820

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	amnadsuhaimi.blogspot.com Internet Source	5%
2	Marekan Marekan, Teguh Ansori. "Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Study Di Desa Galak Kec. Slahung Kab. Ponorogo", Journal of Community Development and Disaster Management, 2019 Publication	3%
3	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	3%
4	Submitted to iGroup Student Paper	2%
5	Muhamad Awiet Wiedanto Prasetyo, Gustin Setyaningsih, Afilda Trisetya Riziana, Sabrina Uhti Kusreynada, Dhewanda Putro Laksono. "Pelatihan Aplikasi Anggaran Kerja Berbasis Website Guna Menentukan Rencana Kerja Anggaran Pembangunan Desa", Jurnal	2%

BAB III Muhammad Adnan Jakaria 105711101820

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to Universitas Bung Hatta

Student Paper

2%

2

Sherly Ferdinandus. "EFEKTIVITAS PEMANFAATAN ALOKASI DANA DESA BAGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN DI DESA WAYAME KECAMATAN TELUK AMBON", Equilibrium: Journal of Economics and Development Studies, 2024

Publication

2%

3

moam.info

Internet Source

2%

4

repository.iainkudus.ac.id

Internet Source

2%

5

www.neliti.com

Internet Source

2%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off

BAB IV Muhammad Adnan Jakaria 105711101820

ORIGINALITY REPORT

8%	6%	4%	2%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	profil.digitaldesa.id Internet Source	3%
2	etheses.uingusdur.ac.id Internet Source	2%
3	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	2%
4	Eko Supralianto Putra, Dahliah Dahliah. "Efektivitas Kebijakan Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Infrastruktur Di Desa Batu Belereng Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai", PARADOKS : Jurnal Ilmu Ekonomi, 2020 Publication	2%

Exclude quotes Off Exclude matches < 2%
 Exclude bibliography Off

BAB V Muhammad Adnan Jakaria 105711101820

ORIGINALITY REPORT

0 %	0 %	0 %	0 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Exclude quotes	Off	Exclude matches	< 2%
Exclude bibliography	Off		



BIOGRAFI PENULIS



Muhammad Adnan Jakaria, panggilan Adnan lahir di Takalar pada tanggal 07 Juli 2000 dari pasangan suami istri Bapak Syaharuddin dan Ibu Almh. Salassari. Peneliti adalah anak kedua dari tiga bersaudara. Peneliti sekarang tinggal di Dusun Popoloe Desa Barangmamase, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan.

Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti yaitu SDN No. 189 Inpres Kanite lulus tahun 2012, SMP Negeri 3 Galesong Selatan lulus tahun 2015, SMK Negeri 1 Takalar lulus tahun 2018 dan pada tahun 2020 mengikuti Program S1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program Studi Ekonomi Pembangunan Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang, sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Makassar.